



BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

Penyaluran Subsidi LPG 3 kilogram

Pekerja mengangkut tabung gas elpiji 3 kg di Tangerang, Rabu (26/1/2022). Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) agar lebih tepat sasaran. Dengan perubahan skema subsidi ini, maka harga LPG 3 kg akan naik. Subsidi akan diberikan secara langsung kepada mereka yang berhak.

Lampaui Target, BPH Migas Catat PNBP Rp 1,1 Triliun

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hilir migas sebesar Rp 1,1 triliun atau lebih tinggi 101% dari target yang ditetapkan yakni Rp 1,086 triliun.

Oleh Euis Rita Hartati

PNBP ini berasal dari iuran badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan badan usaha yang melakukan kegiatan niaga dan/atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.

"PNBP yang melebihi target di tengah situasi pandemi menjadi hal yang patut kita syukuri, ini menjadi pemicu bagi BPH Migas untuk berkinerja lebih baik lagi di tahun 2022," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati di Jakarta, kemarin.

Di sisi pengeluaran, realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 94,94%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

Bukan hanya PNBP yang melebihi target, pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga hingga akhir tahun 2021 secara kumulatif mencapai 331 lembaga penyalur. Untuk tahun 2021, realisasi mencapai 78 dari target 76 lembaga penyalur. Dicanangkan sesuai roadmap program BBM Satu Harga hingga tahun 2024 akan mencapai 583 lembaga penyalur.

Program BBM Satu Harga ini dicanangkan Presiden Joko Widodo pada akhir 2016 dan ditujukan agar harga jual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan harga jual Jenis BBM Tertentu (JBT) sama hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya, di mana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI.



Erika Retnowati

Selain PNBP dan pelaksanaan program BBM satu harga, capaian BPH Migas lainnya yakni dalam hal penetapan harga gas bumi. Erika menjelaskan bahwa kumulatif sampai tahun 2021 penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mencapai 62 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 telah ditetapkan harga gas bumi Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) untuk 15 Kabupaten/Kota dari target 12 Kabupaten/Kota. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ini lebih murah dan kompetitif daripada gas LPG non subsidi.

Dalam hal penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (*toll fee*) kumulatif hingga 2021 sebanyak 70 ruas. Biaya transmisi (*toll fee*) atau tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagai salah satu komponen harga gas hilir menjadi salah satu tugas dari BPH Migas untuk mengatur

“

Penetapan tarif tersebut ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter (Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa) dan para shipper (pengguna jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa).

Erika Retnowati
Kepala BPH Migas

dan menetapkan.

"Penetapan tarif tersebut ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter (Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa) dan para shipper (pengguna jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa),"

terang Erika.

Sementara dalam hal realisasi infrastruktur gas bumi juga melebihi target. Tercatat dari target panjang pipa transmisi, distribusi dan jargas sepanjang 15.800 kilometer (km), hingga akhir tahun 2021 telah terealisasi sepanjang 19.045,78 km.

Capaian lain BPH Migas pada 2021 adalah realisasi JBT untuk Solar subsidi sebesar 15,59 juta kiloliter (KL) atau sebesar 99% persen dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 15,80 juta KL. Realisasi JBT lainnya, yaitu minyak tanah sebesar 0,48 juta KL atau sebesar 98 persen dari kuota sebesar 0,50 juta KL. Sementara itu, realisasi JBKP pada 2021 jenis premium sebesar 3,4 juta KL atau sebesar 34% dari kuota 10 juta KL.

BPH Migas, kata Erika, akan terus meningkatkan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP mulai 2022 ini agar lebih tepat sasaran. Untuk itu, BPH Migas bersinergi antar instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya melalui sosialisasi di 5 wilayah provinsi di akhir tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada 9 November 2021 dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berisikan bantuan pengamanan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang bahan bakar minyak dan gas bumi.

"Kami berkomitmen agar sektor hilir migas memiliki kebermanfaatannya untuk mendistribusikan BBM ke pelosok negeri serta memberikan dukungan harga gas bumi yang kompetitif serta dalam melakukan pengawasan distribusi BBM dibantu oleh TNI, POLRI dan stakeholder lainnya, sehingga lebih tepat sasaran" tutup Erika.

Hipmi: Transisi Energi Peluang Tingkatkan Komponen Dalam Negeri

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan, masa transisi energi menuju *net zero emissions* pada 2060 merupakan peluang untuk meningkatkan komponen dalam negeri.

Hal ini menjadi benang merah dalam acara webinar *Indonesia Economic Outlook 2022*, Rabu (26/1). Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial yang memberikan *keynote speaker*.

Adapun pembicara acara tersebut yakni Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, *Executive Vice President* Pembangunan dan EBT PLN Harry Nugraha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Maman Abdurrahman, dan *Vice Chief of Indonesia Economic Outlook HIPMI G20 2022* Ahmad Adisuryo.

Ahmad mengatakan, HIPMI menyambut baik transisi energi yang saat ini sedang berlangsung. Dia menyebutkan hal ini sebagai peluang bagi pengusaha dalam negeri untuk turut berkontribusi. "Pengembangan EBT ini sepenuhnya impor atau ada kandungan komponen dalam negeri. Pengusaha (dalam negeri) tidak ingin ketinggalan kereta. Kalau banyak impor bisa gigit jari," kata Ahmad di Jakarta, Rabu (26/1).

Ahmad mencontohkan komponen pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya 5-10 megawatt (MW). Bila sepenuhnya mengandalkan barang impor maka biaya produksi listriknya mencapai US\$ 0,16 cent per kWh. Sementara bila ada kandungan dalam negeri dalam komponen PLTS maka biaya produksi listriknya hanya US\$ 0,3 cent per kWh. "Ini yang menjadi sorotan kami," ujarnya.

Harry mengungkapkan, PLN berkomitmen dalam meningkatkan komponen dalam negeri. Bahkan dia menyebut PLN membuka peluang bagi pengusaha dalam negeri untuk turut berkontribusi dalam memproduksi komponen pembangkit fosil. Bukan hanya berfokus di pembangkit EBT. "Peraturan Direksi untuk peningkatan komponen dalam negeri sedang disusun," ujarnya.

Sementara itu, Satya menyebut tarif pembangkit energi terbarukan menjadi kunci. Peralnya pembangkit ini harus berkompetisi dengan pembangkit fosil yang relatif lebih murah. Bila tarif dari pembangkit energi terbarukan lebih tinggi maka ujung-ujungnya negara yang bakal terbebani dengan subsidi atau kompensasi. Sebagai contoh PLTS yang dilengkapi dengan baterai penyimpan energi menghasilkan tarif yang tinggi. "Saat tidak tersedia, maka tidak atraktif," ungkapnya.

Maman menyebut Indonesia masih memiliki sumber energi fosil yang melimpah. Mulai dari batu bara, minyak dan gas. Menurutnya sumber energi tersebut harus terlebih dahulu dioptimalisasi bahkan hingga habis cadangannya.

Indonesia memiliki waktu sekitar 30 tahun dalam mencapai *net zero emissions*. Dalam 30 tahun mendatang tren global akan berubah dan sepenuhnya melarang pemanfaatan energi fosil. "Kurang lebih 30 tahun lagi kita akan gigit jari melihat batu bara, minyak dan gas tidak bisa dimanfaatkan karena aturan melarang," ujarnya. (rap)

Indonesia-Singapura Teken Kerja Sama di Sektor Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) di bidang kerja sama energi.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi salah satu *deliverables* pada pertemuan *Leaders' Retreat* antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 25 Januari 2022 di Bintan.

"Saya melihat nilai penting MoU di level *G-to-G* sebagai dasar kedua negara untuk mendorong dan meningkatkan insiatif proyek kerja sama energi, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis," kata Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/1).

MoU kerja sama bidang energi tersebut, tambah Arifin, akan memayungi sejumlah area, termasuk diantaranya: pengembangan EBT seperti PLTS dan hidrogen; interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional; perdagangan energi; pembiayaan proyek energi; dan peningkatan kapasitas SDM.

Di samping itu, MoU tersebut mengatur pula pelaksanaan Kelompok Kerja Energi (*Working Group on Energy*) yang akan menjadi forum rutin untuk menetapkan, memantau, dan mengevaluasi kerja sama energi antara kedua negara.

"Saya yakin *Working Group* jadi forum krusial bagi kedua pihak untuk bekerja sama membantu merealisasikan transisi energi pada masing-masing negara. Topik seperti CCUS dan pengembangan energi baru dan terbarukan akan menjadi perbincangan," jelas Arifin.

Arifin juga menyampaikan urgensi pengembangan EBT antara kedua negara untuk mendukung pengembangan Green Data Centre dan Industri Berbasis EBT (*Renewable Energy Based Industry/RE-BID*). Pengembangan EBT juga akan berkontribusi pada upaya transisi energi dan komitmen pengurangan emisi karbon kedua negara.

Sebagai informasi, acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura Suryapratomo dan Duta Besar Singapura untuk RI Anil Kumar Nayyar. "Ini kali pertama perjanjian *G to G* mengenai sektor energi bagi kedua pihak. Maka dari itu, ini menjadi milestone hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura," jelas Arifin.

Arifin mengungkapkan, posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi Singapura untuk turut serta berkontribusi mewujudkan tujuan dari transisi energi. "Termasuk di dalamnya topik mengenai akseibilitas energi, pengembangan *smart and clean technology*, serta pembiayaan energi," tegas Arifin. (rap)



Arifin Tasrif

PLN Renegosiasi Kontrak Listrik Swasta

JAKARTA - PT PLN (Persero) melakukan renegosiasi kontrak dengan pengembang listrik swasta (*independent power producer/IPP*), terkait mekanisme *take or pay* yang harus dibayar sekitar Rp 3,5 triliun per tahun. Hal ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh perusahaan untuk memperbaiki kinerja, mengingat saat ini PLN tengah mengalami kelebihan pasokan listrik.

"Dengan kondisi *over supply* ini kami melakukan renegosiasi dengan pihak IPP dari target kami Rp 60 triliun *cost efficiency* ini sudah kami capai adalah Rp 34 triliun yang sudah kami capai dan sedang berproses," Direktur Utama PLN

Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (26/1).

Selain itu, katanya, pihaknya juga melakukan prioritas investasi untuk mempertahankan rasio gearing dan debt service.

PLN diketahui masih memiliki utang yang sangat besar. Kendati begitu, utang tersebut telah berhasil dipangkas. Darmawan mengatakan utang PLN saat ini sekitar Rp 430 triliun. Jumlah utang tersebut turun Rp 32 triliun dari posisi utang di awal tahun lalu sebesar Rp 450 triliun.

"Jadi di sini juga walaupun kondisi COVID kami mengelola utang kami dengan baik sehingga

interest bearing debt kami di awal tahun ini turun dari Rp 450 triliun menjadi sekitar Rp 430-an triliun," katanya.

Dia menjelaskan, penurunan utang tersebut merupakan buah dari upaya perusahaan melakukan efisiensi operasi dan investasi. Berdasarkan arahan Kementerian BUMN, PLN akan mengurangi belanja modal atau capital expenditure (*capex*).

"Kemudian arahan juga dari Kementerian BUMN bahwa selanjutnya capex kami juga bisa diturunkan tetapi di tengah bagaimana RUPTL yang baru menekankan pengembangan dari EBT," katanya. (es)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP VI TAHUN 2017

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017, Akta No. 30, tanggal 13 September 2017, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 ("RUPU") di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, atas permintaan PT Medco Energi Internasional Tbk selaku Emiten, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan kebijakan pemerintah lainnya yang terkait. Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, pengamgilan RUPU akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada hari Kamis, 17 Februari 2022.

Jakarta, 27 Januari 2022

EMITEN
MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

WALI AMANAT
BANK MEGA
PT BANK MEGA Tbk

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP VI TAHUN 2017

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017, Akta No. 105, tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 ("RUPU") di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, atas permintaan PT Medco Energi Internasional Tbk selaku Emiten, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan kebijakan pemerintah lainnya yang terkait. Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, pengamgilan RUPU akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada hari Kamis, 17 Februari 2022.

Jakarta, 27 Januari 2022

EMITEN
MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

WALI AMANAT
BANK MEGA
PT BANK MEGA Tbk